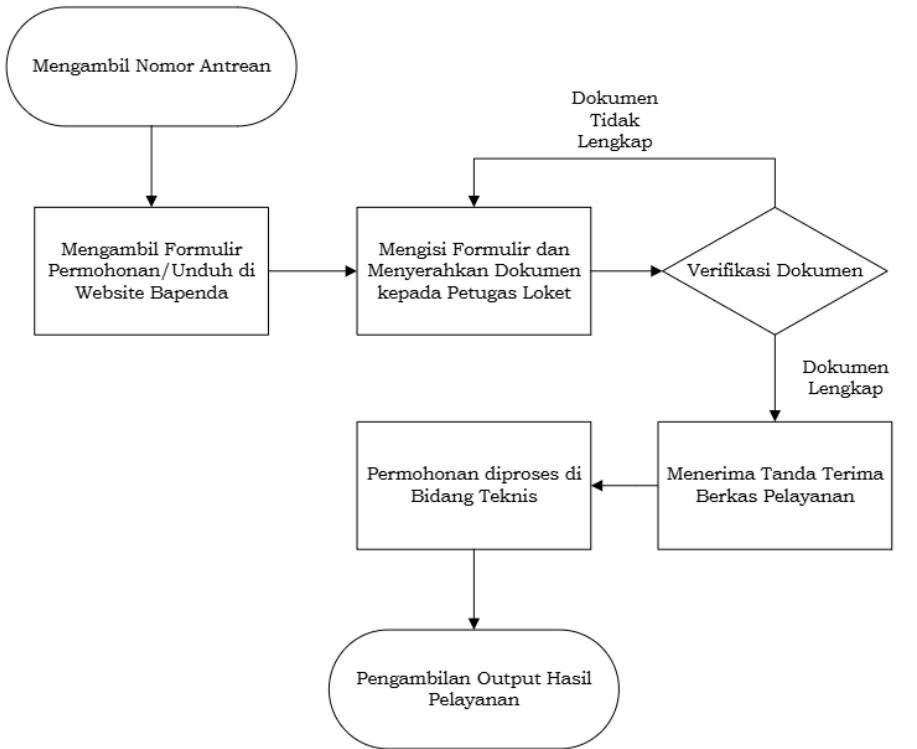


15. Standar Pelayanan Permohonan Aktivasi NOPD

Nama Unit Pelayanan	Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Jenis Layanan	Permohonan Aktivasi NOPD
Deskripsi Layanan	Pelayanan administratif bagi wajib pajak untuk mengaktifkan kembali Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) yang berstatus nonaktif (terbelokir) agar dapat digunakan kembali dalam transaksi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Permohonan Aktivasi NOPD yang non aktif sebelum tahun 2015 disertai dengan dokumen pendukung berupa: a. Surat Permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui Bapenda; b. Fotocopy KTP; c. Fotocopy Kartu Keluarga, dalam hal pemohon merupakan Ahli Waris; d. Fotocopy Akta Pendirian, dalam hal pemohon merupakan Badan; e. Bukti Pelunasan PBB-P2; f. Fotocopy Bukti Kepemilikan, Penguasaan, dan/atau Pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, atau Lurah; g. Foto Objek Pajak; h. Titik Koordinat Objek Pajak; i. Dokumen dan/atau informasi lainnya yang diperlukan. 2. Permohonan Aktivasi NOPD yang non aktif setelah tahun 2015 disertai dengan dokumen pendukung berupa: a. Surat Permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Walikota melalui Bapenda; b. Fotocopy KTP; c. Fotocopy KK, dalam hal pemohon merupakan Ahli Waris; d. Fotocopy Akta Pendirian, dalam hal pemohon merupakan Badan; e. Lunas PBB-P2; f. Dokumen dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Mengambil Nomor Antrean]) --> B[Mengambil Formulir Permohonan/Unduh di Website Bapenda] B --> C[Mengisi Formulir dan Menyerahkan Dokumen kepada Petugas Loker] C --> D{Verifikasi Dokumen} D -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> C D -- "Dokumen Lengkap" --> E[Menerima Tanda Terima Berkas Pelayanan] E --> F[Permohonan diproses di Bidang Teknis] F --> G([Pengambilan Output Hasil Pelayanan]) </pre> 1. Wajib Pajak atau kuasanya mengambil nomor antrean pelayanan PBB-P2 pada mesin antrean yang tersedia di ruang lobi Mall Pelayanan Publik (MPP); 2. Wajib Pajak mengambil formulir permohonan secara langsung melalui Petugas Informasi/Loker, atau mengunduh formulir digital secara mandiri melalui laman resmi Bapenda (bapenda.tangerangkota.go.id) atau (pbb.tangerangkota.go.id); 3. Wajib Pajak mengisi formulir secara lengkap, kemudian menyerahkan formulir beserta seluruh dokumen persyaratan kepada petugas loket pelayanan Bapenda; 4. Petugas loket pelayanan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, petugas mencetak dan menyerahkan Surat Tanda Terima Berkas Pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai bukti resmi pendaftaran; 5. Petugas loket meneruskan berkas: a. permohonan aktivasi sebelum tahun 2015 kepada tim teknis Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data untuk mengaktifkan kembali NOPD PBB-P2; b. permohonan aktivasi setelah tahun 2015 kepada tim teknis Bidang Pelayanan melalui Subbid Pendaftaran dan Pelayanan untuk mengaktifkan kembali NOPD PBB-P2; 6. Wajib Pajak datang kembali ke loket sesuai estimasi pelayanan untuk pengambilan produk pelayanan yaitu dengan menunjukkan Surat Tanda Terima Berkas, kemudian petugas loket menyerahkan produk output berupa NOPD PBB-P2 yang telah diaktifkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Aktivasi NOPD yang non aktif sebelum tahun 2015 (Estimasi)* 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dilanjutkan ke bidang teknis.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		)* <i>perkiraan waktu pelayanan adalah waktu penyelesaian apabila berkas persyaratan dan informasi data yang dilampirkan oleh wajib pajak dinyatakan lengkap dan tidak memerlukan pendalaman, penelitian, dan verifikasi lapangan.</i> 2. Aktivasi NOPD yang non aktif setelah tahun 2015 Estimasi 1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	SPPT PBB-P2
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Kotak Saran 2. Melalui email: bapenda.tangerangkota.go.id ; 3. Instagram: @bapenda_tangerangkota; 4. Melalui Aplikasi Tangerang Live, Laksa (Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda); 5. Melalui website bapenda.tangerangkota.go.id ; 6. Melalui Nomor Whatapp CS Bapenda: 082133335530 atau CS Penyuluhan 0813996440; 7. Hari adalah hari kerja.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10); 5. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2025 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2025 Nomor 63); 6. Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2025 Nomor 64).

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana: 1. Meja dan Kursi 2. Komputer 3. Mesin Scanner 4. Printer Prasarana: 3. Ruang Tunggu Berpendingin Udara 4. Ruang Menyusui Fasilitas: 1. Tempat Bermain Anak di Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kompetensi: 1. Manajemen Pelayanan Prima; 2. Menguasi peraturan/ketentuan tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB.
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan melekat secara berjenjang oleh Kabid Pelayanan melalui Subbid Pendaftaran dan Pelayanan terkait persyaratan pelayanan; 2. Pengawasan melekat secara berjenjang oleh Kabid Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data terhadap akurasi keabsahan data/dokumen atas aktivasi NOPD PBB-P2 yang non aktif sebelum dan setelah tahun 2015; 3. Pengawasan dan pengendalian secara berjenjang oleh Kabid Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang, terhadap akurasi data piutang dan keabsahan data/dokumen pelayanan atas aktivasi NOPD PBB-P2 yang non aktif sebelum dan setelah tahun 2015; 4. Audit fungsional kepatuhan operasional berkala oleh Sekretaris Badan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas Aktivasi NOPD PBB-P2 yang diterbitkan guna menjaga akuntabilitas pencatatan kas pendapatan daerah.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 6 (enam) orang Petugas Pelaksana Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Kepastian proses pelayanan Aktivasi NOPD PBB-P2 secara tepat waktu; 2. Menjamin bahwa proses pelayanan tidak menimbulkan resiko fisik, hukum maupun kerugian bagi pengguna layanan; 3. Memberikan perlindungan hak kepada wajib pajak/masyarakat untuk mendapatkan perlakuan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi atas layanan yang diberikan, dan menjamin tidak adanya pungutan biaya administrasi (gratis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjamin kerahasiaan data/dokumen pribadi wajib pajak seperti KTP, bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (Sertifikat, AJB, Surat Keterangan lainnya) disimpan secara aman; 2. Menjamin keaslian dan keabsahan produk layanan yang diterama atau dimohonkan yaitu Aktivasi NOPD PBB-P2;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Ketersediaan penjagaan oleh petugas keamanan (securiti/satpam) dan pemantauan menggunakan CCTV di area pelayanan; 4. Ketersediaan fasilitas Gedung Pelayanan Publik yang aman dan nyaman, serta ramah anak bagi pemohon, yang dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran (APAR), jalur evakuasi, dan sistem deteksi kebakaran.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Pelayanan: - sistem antrean digital untuk mengukur kecepatan durasi pelayanan petugas dalam melayani wajib pajak; - sistem monitoring pelayanan untuk memonitor proses pelayanan. 2. Evaluasi kinerja bulanan yaitu berupa rekapitulasi jumlah permohonan yang masuk dibandingkan dengan permohonan yang diselesaikan guna memastikan kepatuhan Service Level Agreement (SLA) tepat 14 (empat belas) hari kerja untuk aktivasi NOPD sebelum tahun 2015, dan 1 (satu) hari kerja untuk aktivasi NOPD setelah tahun 2015; 3. Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dan tindak lanjut bulanan terhadap laporan pengaduan yang masuk melalui melalui Kotak Saran, Buku Tamu Website Kota Tangerang, maupun aplikasi Laksa.